



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 309 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

BUPATI REMBANG

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.596.566.692.500,00.	
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.937.216.565.110,00.</u>	(-)
Defisit	(Rp. 340.649.872.610,00)	
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp. 352.974.872.610,00.	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 12.325.000.000,00.</u>	(-)
Pembiayaan Netto	Rp. 340.649.872.610,00.	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah
sejumlah | Rp 180.807.678.500,00; |
| b. Dana perimbangan
sejumlah | Rp 970.288.185.000,00; |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp 445.470.829.000,00; |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:

- | | |
|--|------------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp 38.153.500.000,00; |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp 27.853.821.500,00; |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sejumlah | Rp 6.340.000.000,00; |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp 108.460.357.000,00. |

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 28.052.000.000,00;
 - Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 785.380.985.000,00;
 - Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 156.855.200.000,00.
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
- Hibah sejumlah Rp 1.566.904.000,00;
 - Dana Darurat sejumlah Rp 0,00;
 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 75.549.967.000,00;
 - Dana Penyesuaian dari Otonomi Khusus sejumlah Rp 368.353.958.000,00;

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.151.214.323.000,00
 - Belanja Langsung sejumlah Rp 786.002.242.110,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:
- Belanja Pegawai sejumlah Rp 808.954.601.000,00
 - Belanja Bunga sejumlah Rp 37.000.000,00
 - Belanja Subsidi sejumlah Rp -
 - Belanja Hibah sejumlah Rp 8.237.928.000,00
 - Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 6.470.000.000,00
 - Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp 6.455.961.000,00
 - Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah Rp 320.058.833.000,00
 - Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 1.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:
- Belanja pegawai sejumlah Rp 138.340.513.800,00
 - Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 259.780.056.745,00
 - Belanja modal sejumlah Rp 387.881.671.565,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- Penerimaan sejumlah Rp 352.974.872.610,00
 - Pengeluaran sejumlah Rp 12.325.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah (SiLPA)	Rp	352.974.872.610,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	0,00
d. Penerimaan Pinjaman sejumlah	Rp	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp	0,00
g. Pencairan Deposito sejumlah	Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp	12.270.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp	55.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

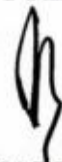
Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj.BUPATI REMBANG,



SUKO MARDIONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HARI SUSANTO

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KAL. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : 3 / 2015



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.596.566.692.500,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	180.807.678.500,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	38.153.500.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	27.853.821.500,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.340.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.460.357.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	970.288.185.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.052.000.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	785.380.985.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	156.855.200.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	445.470.829.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.566.904.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.549.967.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	368.353.958.000,00
2	BELANJA	1.937.216.565.110,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.151.214.323.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	808.954.601.000,00
2.1.2	Belanja Bunga	37.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	8.237.928.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.470.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.455.961.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	320.058.833.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	786.002.242.110,00
2.2.1	Belanja Pegawai	138.340.513.800,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	259.780.056.745,00
2.2.3	Belanja Modal	387.881.671.565,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(340.649.872.610,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	352.974.872.610,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	352.974.872.610,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12.325.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.270.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	55.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	340.649.872.610,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Pj. BUPATI REMBANG

SUKO MARDIONO

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2016

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib	1.584.096.447.000,00	1.135.078.392.000,00	660.339.642.074,00	1.795.418.034.074,00
1.01	Pendidikan	0,00	575.387.143.000,00	82.462.958.700,00	657.850.101.700,00
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	0,00	575.387.143.000,00	82.462.958.700,00	657.850.101.700,00
1.02	Kesehatan	103.026.569.000,00	66.058.369.000,00	201.619.492.216,00	267.677.861.216,00
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	33.026.569.000,00	40.992.314.000,00	110.200.449.840,00	151.192.763.840,00
1.02 . 1.02.02	RSUD dr. R. SOETRASNO	70.000.000.000,00	25.066.055.000,00	91.419.042.376,00	116.485.097.376,00
1.03	Pekerjaan Umum	2.255.000.000,00	14.979.035.000,00	207.302.907.048,00	222.281.942.048,00
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.255.000.000,00	14.979.035.000,00	207.302.907.048,00	222.281.942.048,00
1.06	Perencanaan Pembangunan	0,00	3.538.155.000,00	7.590.432.000,00	11.128.597.000,00
1.06 . 1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	3.538.165.000,00	7.590.432.000,00	11.128.597.000,00
1.07	Perhubungan	2.143.864.000,00	5.867.437.000,00	4.675.866.000,00	10.543.303.000,00
1.07 . 1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.143.864.000,00	5.867.437.000,00	4.675.866.000,00	10.543.303.000,00
1.08	Lingkungan Hidup	0,00	2.707.932.000,00	3.443.490.000,00	6.151.422.000,00
1.08 . 1.08.02	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	2.707.932.000,00	3.443.490.000,00	6.151.422.000,00
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	3.006.935.000,00	3.037.641.800,00	6.044.576.800,00
1.10 . 1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	3.006.935.000,00	3.037.641.800,00	6.044.576.800,00
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	2.165.000.000,00	2.165.000.000,00
1.11 . 1.12.01	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	2.165.000.000,00	2.165.000.000,00
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,00	9.576.217.000,00	5.261.816.310,00	14.838.033.310,00
1.12 . 1.12.01	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	9.576.217.000,00	5.261.816.310,00	14.838.033.310,00
1.13	Sosial	0,00	0,00	2.260.000.000,00	2.260.000.000,00
1.13 . 1.14.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	2.260.000.000,00	2.260.000.000,00
1.14	Tenaga Kerja	0,00	5.586.256.000,00	5.186.628.000,00	10.772.884.000,00
1.14 . 1.14.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	5.586.256.000,00	5.186.628.000,00	10.772.884.000,00
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.800.000.000,00	9.490.304.000,00	3.449.424.000,00	12.939.728.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.15 . 1.15.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	2.800.000.000,00	9.490.304.000,00	3.449.424.000,00	12.939.728.000,00
1.16	Penanaman Modal	0,00	0,00	829.420.000,00	829.420.000,00
1.16 . 1.20.09	KANTOR PELAYANAN DAN PERIJINAN TERPADU	0,00	0,00	829.420.000,00	829.420.000,00
1.17	Kebudayaan	0,00	0,00	857.000.000,00	857.000.000,00
1.17 . 2.04.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	857.000.000,00	857.000.000,00
1.18	Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
1.18 . 2.04.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0,00	7.268.804.000,00	17.114.186.000,00	24.382.990.000,00
1.19 . 1.19.01	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	1.540.569.000,00	3.990.469.000,00	5.531.038.000,00
1.19 . 1.19.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	3.551.407.000,00	7.126.717.000,00	10.678.124.000,00
1.19 . 1.19.03	RADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	2.176.828.000,00	5.997.000.000,00	8.173.828.000,00
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	1.473.871.014.000,00	420.814.621.000,00	100.275.872.000,00	521.090.493.000,00
1.20 . 1.20.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	8.986.081.000,00	0,00	8.986.081.000,00
1.20 . 1.20.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	749.821.000,00	0,00	749.821.000,00
1.20 . 1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	6.493.500.000,00	13.766.056.000,00	36.685.440.000,00	50.453.538.000,00
1.20 . 1.20.04	SEKRETARIAT DPRD	0,00	3.857.961.000,00	21.123.571.000,00	24.981.532.000,00
1.20 . 1.20.05	DPPKAD	1.467.377.514.000,00	354.623.568.000,00	15.593.621.000,00	370.214.189.000,00
1.20 . 1.20.07	INSPEKTORAT	0,00	3.559.470.000,00	6.058.590.000,00	9.618.060.000,00
1.20 . 1.20.08	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	3.612.976.000,00	7.121.062.000,00	10.734.038.000,00
1.20 . 1.20.09	KANTOR PELAYANAN DAN PERIJINAN TERPADU	0,00	1.456.104.000,00	653.100.000,00	2.109.204.000,00
1.20 . 1.20.10	KECAMATAN REMBANG	0,00	5.557.777.000,00	2.874.880.000,00	8.432.657.000,00
1.20 . 1.20.11	KECAMATAN KALIOTI	0,00	2.212.168.000,00	742.304.000,00	2.954.472.000,00
1.20 . 1.20.12	KECAMATAN SULANG	0,00	1.813.473.000,00	796.644.000,00	2.610.117.000,00
1.20 . 1.20.13	KECAMATAN SUMBER	0,00	1.881.138.000,00	693.100.000,00	2.574.238.000,00
1.20 . 1.20.14	KECAMATAN BULU	0,00	1.629.590.000,00	763.560.000,00	2.393.150.000,00
1.20 . 1.20.15	KECAMATAN LASEM	0,00	2.096.173.000,00	750.104.000,00	2.846.277.000,00
1.20 . 1.20.16	KECAMATAN PANCUR	0,00	2.222.979.000,00	729.600.000,00	2.952.579.000,00
1.20 . 1.20.17	KECAMATAN SLUKE	0,00	1.724.912.000,00	719.600.000,00	2.444.512.000,00
1.20 . 1.20.18	KECAMATAN PAMOTAN	0,00	1.716.400.000,00	758.360.000,00	2.474.760.000,00
1.20 . 1.20.19	KECAMATAN GUNEM	0,00	1.708.365.000,00	760.360.000,00	2.468.725.000,00
1.20 . 1.20.20	KECAMATAN SALE	0,00	1.620.884.000,00	756.730.000,00	2.377.614.000,00
1.20 . 1.20.21	KECAMATAN KRAGAN	0,00	2.158.113.000,00	1.086.626.000,00	3.244.739.000,00
1.20 . 1.20.22	KECAMATAN SEDAN	0,00	1.872.280.000,00	759.220.000,00	2.631.500.000,00
1.20 . 1.20.23	KECAMATAN SARANG	0,00	1.989.290.000,00	849.400.000,00	2.838.690.000,00
1.21	Ketahanan Pangan	0,00	8.776.994.000,00	5.104.228.000,00	13.881.222.000,00
1.21 . 1.21.01	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN P4K	0,00	8.776.994.000,00	5.104.228.000,00	13.881.222.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	2.590.000.000,00	2.590.000.000,00
1.22 . 1.12.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	2.590.000.000,00	2.590.000.000,00
1.24	Kearsipan	0,00	2.020.180.000,00	1.663.280.000,00	3.683.460.000,00
1.24 . 1.24.01	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	0,00	2.020.180.000,00	1.663.280.000,00	3.683.460.000,00
1.26	Perpustakaan	0,00	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00
1.26 . 1.24.01	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	0,00	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00
2	Urusan Pilihan	12.470.245.500,00	16.135.931.000,00	125.662.600.036,00	141.798.531.036,00
2.01	Pertanian	133.472.000,00	6.596.795.000,00	51.653.737.361,00	58.250.532.361,00
2.01 . 1.21.01	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PAK	0,00	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00
2.01 . 2.01.01	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	133.472.000,00	6.596.795.000,00	50.533.737.361,00	57.130.532.361,00
2.02	Kehutanan	0,00	0,00	4.345.198.111,00	4.345.198.111,00
2.02 . 2.01.01	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	0,00	0,00	4.345.198.111,00	4.345.198.111,00
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	2.468.148.000,00	14.693.015.000,00	17.161.163.000,00
2.03 . 2.03.01	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	2.468.148.000,00	14.693.015.000,00	17.161.163.000,00
2.04	Pariwisata	1.058.000.000,00	2.766.281.000,00	8.243.590.000,00	11.009.871.000,00
2.04 . 2.04.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHKAGA	1.058.000.000,00	2.766.281.000,00	8.243.590.000,00	11.009.871.000,00
2.05	Kelautan dan Perikanan	11.278.773.500,00	4.304.707.000,00	27.931.116.815,00	32.235.823.815,00
2.05 . 2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.278.773.500,00	4.304.707.000,00	27.931.116.815,00	32.235.823.815,00
2.06	Perdagangan	0,00	0,00	17.368.942.749,00	17.368.942.749,00
2.06 . 1.15.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	0,00	0,00	17.368.942.749,00	17.368.942.749,00
2.07	Perindustrian	0,00	0,00	1.275.000.000,00	1.275.000.000,00
2.07 . 1.15.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	0,00	0,00	1.275.000.000,00	1.275.000.000,00
2.08	Transmigrasi	0,00	0,00	152.000.000,00	152.000.000,00
2.08 . 1.14.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	152.000.000,00	152.000.000,00
JUMLAH		1.596.566.692.500,00	1.151.214.323.000,00	786.002.242.110,00	1.937.216.565.110,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(340.649.872.610,00)			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib	352.974.872.610,00	12.325.000.000,00	340.649.872.610,00	
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeduDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	352.974.872.610,00	12.325.000.000,00	340.649.872.610,00	
1.20 . 1.20.05	DPPKAD	352.974.872.610,00	12.325.000.000,00	340.649.872.610,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00

Pj. BUPATI REMBANG



SUKO MARJIONO

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN Usuran Wajib Pendidikan	0,00	575.387.143.000,00	82.462.958.700,00	657.850.101.700,00
1.02.01	DINAS KESEHATAN Usuran Wajib Kesehatan	0,00	575.387.143.000,00	82.462.958.700,00	657.850.101.700,00
1.02.02	RSUD dr. R.SOETRASNO Usuran Wajib Kesehatan	33.026.569.000,00	40.992.314.000,00	110.200.449.840,00	151.192.763.840,00
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM Usuran Wajib Pekerjaan Umum	33.026.569.000,00	40.992.314.000,00	110.200.449.840,00	151.192.763.840,00
1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Usuran Wajib Perencanaan Pembangunan	70.000.000.000,00	25.066.055.000,00	91.419.042.376,00	116.485.097.376,00
1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Usuran Wajib Perhubungan	70.000.000.000,00	25.066.055.000,00	91.419.042.376,00	116.485.097.376,00
1.08.02	BADAN LINGKUNGAN HIDUP Usuran Wajib Lingkungan Hidup	2.255.000.000,00	14.979.035.000,00	207.302.907.048,00	222.281.942.048,00
1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Usuran Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	2.255.000.000,00	14.979.035.000,00	207.302.907.048,00	222.281.942.048,00
1.12.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Usuran Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Usuran Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Usuran Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	3.538.165.000,00	7.590.432.000,00	11.128.597.000,00
1.14.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Usuran Wajib Sosial Usuran Wajib Tenaga Kerja Usuran Pilihan Transmigrasi	0,00	3.538.165.000,00	7.590.432.000,00	11.128.597.000,00
		0,00	5.867.437.000,00	4.675.866.000,00	10.543.303.000,00
		0,00	5.867.437.000,00	4.675.866.000,00	10.543.303.000,00
		0,00	2.707.932.000,00	3.443.490.000,00	6.151.422.000,00
		0,00	2.707.932.000,00	3.443.490.000,00	6.151.422.000,00
		0,00	3.006.935.000,00	3.037.641.800,00	6.044.576.800,00
		0,00	3.006.935.000,00	3.037.641.800,00	6.044.576.800,00
		0,00	9.576.217.000,00	10.016.816.310,00	19.593.033.310,00
		0,00	0,00	2.165.000.000,00	2.165.000.000,00
		0,00	9.576.217.000,00	5.261.816.310,00	14.838.033.310,00
		0,00	0,00	2.590.000.000,00	2.590.000.000,00
		0,00	5.586.256.000,00	7.598.628.000,00	13.184.884.000,00
		0,00	0,00	2.260.000.000,00	2.260.000.000,00
		0,00	5.586.256.000,00	5.186.628.000,00	10.772.884.000,00
		0,00	0,00	152.000.000,00	152.000.000,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	2	3	4	5	6
1.15.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM				
1.15	Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.800.000.000,00	9.490.304.000,00	22.093.366.749,00	31.583.670.749,00
2.06	Urusan Pilihan Perdagangan	2.800.000.000,00	9.490.304.000,00	3.449.424.000,00	12.939.728.000,00
2.07	Urusan Pilihan Perindustrian	0,00	0,00	17.368.942.749,00	17.368.942.749,00
		0,00	0,00	1.275.000.000,00	1.275.000.000,00
1.19.01	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.19	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0,00	1.540.569.000,00	3.990.469.000,00	5.531.038.000,00
1.19.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.19	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0,00	1.540.569.000,00	3.990.469.000,00	5.531.038.000,00
1.19.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1.19	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0,00	3.551.407.000,00	7.126.717.000,00	10.678.124.000,00
1.20.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	0,00	3.551.407.000,00	7.126.717.000,00	10.678.124.000,00
1.20.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	0,00	2.176.828.000,00	5.997.000.000,00	8.173.828.000,00
1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	0,00	2.176.828.000,00	5.997.000.000,00	8.173.828.000,00
1.20.04	SEKRETARIAT DPRD				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	0,00	8.286.081.000,00	0,00	8.986.081.000,00
1.20.05	DPPKAD				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	0,00	8.986.081.000,00	0,00	8.986.081.000,00
1.20.07	INSPEKTORAT				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	0,00	7.79.821.000,00	0,00	749.821.000,00
1.20.08	BADAN KEPEGAWAIAAN DAERAH				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	0,00	749.821.000,00	0,00	749.821.000,00
1.20.09	KANTOR PELAYANAN DAN PERIJINAN TERPADU				
1.16	Urusan Wajib Penanaman Modal	0,00	13.768.098.000,00	36.685.440.000,00	50.453.538.000,00
			13.768.098.000,00	36.685.440.000,00	50.453.538.000,00
			3.857.961.000,00	21.123.571.000,00	24.981.532.000,00
			3.857.961.000,00	21.123.571.000,00	24.981.532.000,00
			354.620.568.000,00	15.593.621.000,00	370.214.189.000,00
			354.620.568.000,00	15.593.621.000,00	370.214.189.000,00
			3.559.470.000,00	6.058.590.000,00	9.618.060.000,00
			3.559.470.000,00	6.058.590.000,00	9.618.060.000,00
			3.612.976.000,00	7.121.062.000,00	10.734.038.000,00
			3.612.976.000,00	7.121.062.000,00	10.734.038.000,00
			1.456.104.000,00	1.482.520.000,00	2.938.624.000,00
			0,00	829.420.000,00	829.420.000,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawain	0,00	1.456.104.000,00	653.100.000,00	2.109.204.000,00
1.20.10	KECAMATAN REMBANG				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawain	0,00	5.557.777.000,00	2.874.880.000,00	8.432.657.000,00
1.20.11	KECAMATAN KALLORI				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawain	0,00	5.557.777.000,00	2.874.880.000,00	8.432.657.000,00
1.20.12	KECAMATAN SULANG				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawain	0,00	2.212.168.000,00	742.304.000,00	2.954.472.000,00
1.20.13	KECAMATAN SUMBER				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawain	0,00	2.212.168.000,00	742.304.000,00	2.954.472.000,00
1.20.14	KECAMATAN BULU				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawain	0,00	1.813.473.000,00	796.644.000,00	2.610.117.000,00
1.20.15	KECAMATAN LASEM				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawain	0,00	1.813.473.000,00	796.644.000,00	2.610.117.000,00
1.20.16	KECAMATAN PANCUR				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawain	0,00	1.881.138.000,00	693.100.000,00	2.574.238.000,00
1.20.17	KECAMATAN SLUKE				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawain	0,00	1.881.138.000,00	693.100.000,00	2.574.238.000,00
1.20.18	KECAMATAN PAMOTAN				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawain	0,00	1.629.590.000,00	763.560.000,00	2.393.150.000,00
1.20.19	KECAMATAN GUNEM				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawain	0,00	1.629.590.000,00	763.560.000,00	2.393.150.000,00
1.20.20	KECAMATAN SALE				
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawain	0,00	2.096.173.000,00	750.104.000,00	2.846.277.000,00
			2.096.173.000,00	750.104.000,00	2.846.277.000,00
			2.222.979.000,00	729.600.000,00	2.952.579.000,00
			2.222.979.000,00	729.600.000,00	2.952.579.000,00
			1.724.912.000,00	719.600.000,00	2.444.512.000,00
			1.724.912.000,00	719.600.000,00	2.444.512.000,00
			1.716.400.000,00	758.360.000,00	2.474.760.000,00
			1.716.400.000,00	758.360.000,00	2.474.760.000,00
			1.708.365.000,00	760.360.000,00	2.468.725.000,00
			1.708.365.000,00	760.360.000,00	2.468.725.000,00
			1.620.884.000,00	756.730.000,00	2.377.614.000,00
			1.620.884.000,00	756.730.000,00	2.377.614.000,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
			4	5	6
1	2	3			
1.20.21	KECAMATAN KRAGAN Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeduDa, Perangkat Daerah, Kepegawalan	0,00	2.158.113.000,00	1.086.626.000,00	3.244.739.000,00
1.20.22	KECAMATAN SEDAN Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeduDa, Perangkat Daerah, Kepegawalan	0,00	2.158.113.000,00	1.086.626.000,00	3.244.739.000,00
1.20.23	KECAMATAN SARANG Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeduDa, Perangkat Daerah, Kepegawalan	0,00	1.872.290.000,00	759.220.000,00	2.631.500.000,00
1.21.01	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN P4K Urusan Wajib Ketahanan Pangan Urusan Pilihan Pertanian	0,00	1.872.280.000,00	759.220.000,00	2.631.500.000,00
1.24.01	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Urusan Wajib Kearsipan Urusan Wajib Perpustakaan	0,00	1.989.290.000,00	849.400.000,00	2.838.690.000,00
2.01.01	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN Urusan Pilihan Pertanian Urusan Pilihan Kehutanan	0,00	1.989.290.000,00	849.400.000,00	2.838.690.000,00
2.03.01	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	8.776.994.000,00	6.224.228.000,00	15.001.222.000,00
2.04.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Urusan Wajib Kebudayaan Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga Urusan Pilihan Pariwisata	0,00	8.776.994.000,00	5.104.220.000,00	13.881.222.000,00
2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00
		133.472.000,00	2.020.180.000,00	2.213.280.000,00	4.233.460.000,00
		133.472.000,00	2.020.180.000,00	1.663.280.000,00	3.683.460.000,00
		0,00	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00
		133.472.000,00	6.596.795.000,00	54.878.935.472,00	61.475.730.472,00
		0,00	6.596.795.000,00	50.533.737.361,00	57.130.532.361,00
		0,00	0,00	4.345.198.111,00	4.345.198.111,00
		0,00	2.468.148.000,00	14.693.015.000,00	17.161.163.000,00
		0,00	2.468.148.000,00	14.693.015.000,00	17.161.163.000,00
		1.058.000.000,00	2.766.281.000,00	12.000.590.000,00	14.766.871.000,00
		0,00	0,00	857.000.000,00	857.000.000,00
		0,00	0,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
		1.058.000.000,00	2.766.281.000,00	8.243.590.000,00	11.009.871.000,00
		11.278.773.500,00	4.304.707.000,00	27.931.116.815,00	32.235.823.815,00
		11.278.773.500,00	4.304.707.000,00	27.931.116.815,00	32.235.823.815,00
		1.596.566.692.500,00	1.151.214.323.000,00	786.002.242.110,00	1.937.216.565.110,00
	JUMLAH			(340.649.872.610,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)				

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
1.20.05	DPPKAD	352.974.872.610,00	12.325.000.000,00	340.649.872.610,00	
1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeduDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	352.974.872.610,00	12.325.000.000,00	340.649.872.610,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00

Pj. BUPATI REMBANG



SUKO MARDIONO





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 2.05
Organisasi : 2.05.01
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.05.2.05.01.00.00.4	PENDAPATAN	11.278.773.500,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011
2.05.2.05.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.278.773.500,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.150.407.500,00	
2.05.2.05.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	128.366.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.5	BELANJA	32.235.823.815,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.304.707.000,00	
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4.304.707.000,00	
2.05.2.05.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	27.931.116.815,00	
2.05.2.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	803.504.000,00	
2.05.2.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.05.2.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	350.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	343.800.000,00	
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.05.2.05.01.01.07.5.2.3	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	55.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.08.5.2.1	Belanja Pegawai	54.750.000,00	
2.05.2.05.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.05.2.05.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.05.2.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.05.2.05.01.01.17	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.05.2.05.01.01.17.5.2.2	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.18	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	200.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.19	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
2.05.2.05.01.01.19.5.2.1	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor, Kebersihan	18.504.000,00	
2.05.2.05.01.01.19.5.2.2	Belanja Pegawai	18.360.000,00	
2.05.2.05.01.01.20	Belanja Barang dan Jasa	444.000,00	
2.05.2.05.01.01.20.5.2.2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.000.000,00	
2.05.2.05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.07	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	280.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	40.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.10.5.2.3	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.12	Pengadaan lap top	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.12.5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.17	Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga	40.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.17.5.2.3	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	40.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.22.5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	Pe.aturan Bupati Rembang Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	15.000.000,00	
2.05.2.05.01.02.30.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.05.2.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	78.000.000,00	
2.05.2.05.01.03.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</i>	40.000.000,00	
2.05.2.05.01.03.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.05.2.05.01.03.05	<i>Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu</i>	38.000.000,00	
2.05.2.05.01.03.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
2.05.2.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200.000.000,00	
2.05.2.05.01.05.04	<i>Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM</i>	200.000.000,00	
2.05.2.05.01.05.04.5.2.1	Belanja Pegawai	36.900.000,00	
2.05.2.05.01.05.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.600.000,00	
2.05.2.05.01.05.04.5.2.3	Belanja Modal	25.500.000,00	
2.05.2.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan: Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	105.000.000,00	
2.05.2.05.01.06.06	<i>Penyelenggaraan Forum SKPD</i>	25.000.000,00	
2.05.2.05.01.06.06.5.2.1	Belanja Pegawai	9.650.000,00	
2.05.2.05.01.06.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
2.05.2.05.01.06.06.5.2.3	Belanja Modal	5.500.000,00	
2.05.2.05.01.06.07	<i>Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan</i>	25.000.000,00	
2.05.2.05.01.06.07.5.2.1	Belanja Pegawai	13.900.000,00	
2.05.2.05.01.06.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
2.05.2.05.01.06.10	<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD</i>	25.000.000,00	
2.05.2.05.01.06.10.5.2.1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
2.05.2.05.01.06.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.05.2.05.01.06.10.5.2.3	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.05.2.05.01.06.11	<i>Penyusunan Dokumen-Dokumen Anggaran</i>	30.000.000,00	
2.05.2.05.01.06.11.5.2.1	Belanja Pegawai	23.300.000,00	
2.05.2.05.01.06.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
2.05.2.05.01.17	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	175.000.000,00	
2.05.2.05.01.17.01	<i>Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut</i>	50.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.17.01.5.2.1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
2.05.2.05.01.17.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	
2.05.2.05.01.17.02	<i>Sosialisasi dan penerapan sistem perijinan Kelautan dan Perikanan</i>	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.05.2.05.01.17.02.5.2.1	Belanja Pegawai	16.100.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.900.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.17.03	<i>Penanganan konflik nelayan dan penertiban alat tangkap</i>	75.000.000,00	
2.05.2.05.01.17.03.5.2.1	Belanja Pegawai	12.300.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.17.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.700.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	250.000.000,00	
2.05.2.05.01.19.02	<i>Promosi Kelautan dan Perikanan</i>	150.000.000,00	
2.05.2.05.01.19.02.5.2.1	Belanja Pegawai	22.550.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.450.000,00	
2.05.2.05.01.19.03	<i>Sosialisasi Gemar Makan Ikan</i>	100.000.000,00	
2.05.2.05.01.19.03.5.2.1	Belanja Pegawai	25.660.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.19.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.340.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	630.000.000,00	
2.05.2.05.01.20.01	<i>Pengembangan Bibit Ikan Unggul</i>	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.20.01.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
2.05.2.05.01.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
2.05.2.05.01.20.02	<i>Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan</i>	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.20.02.5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.20.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.20.03	<i>Pembinaan dan Pengembangan Perikanan</i>	200.000.000,00	
2.05.2.05.01.20.03.5.2.1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.20.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.20.04	<i>Peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan</i>	130.000.000,00	
2.05.2.05.01.20.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.05.2.05.01.20.04.5.2.3	Belanja Modal	125.000.000,00	
2.05.2.05.01.20.06	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Balai Benih Ikan</i>	200.000.000,00	
2.05.2.05.01.20.06.5.2.1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.20.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.400.000,00	
2.05.2.05.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	22.679.612.815,00	
2.05.2.05.01.21.01	<i>Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap</i>	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.21.01.5.2.1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	
2.05.2.05.01.21.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	
2.05.2.05.01.21.02	<i>Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan</i>	7.741.359.361,00	
2.05.2.05.01.21.02.5.2.3	Belanja Modal	7.741.359.361,00	

KODE REKENING 1	URAIAN 2	JUMLAH 3	DASAR HUKUM 4
2.05.2.05.01.21.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan	300.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.21.03.5.2.1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
2.05.2.05.01.21.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	
2.05.2.05.01.21.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan	200.000.000,00	
2.05.2.05.01.21.04.5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.21.06	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	5.150.000.000,00	
2.05.2.05.01.21.06.5.2.3	Belanja Modal	5.150.000.000,00	
2.05.2.05.01.21.07	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	3.300.000.000,00	
2.05.2.05.01.21.07.5.2.1	Belanja Pegawai	2.107.560.000,00	Peraturan Bupati Rembang Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.21.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.129.140.000,00	
2.05.2.05.01.21.07.5.2.3	Belanja Modal	63.300.000,00	
2.05.2.05.01.21.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	750.000.000,00	
2.05.2.05.01.21.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.21.14	Pembangunan Jalan Pangkalan Pendaratan Ikan	2.468.253.454,00	
2.05.2.05.01.21.14.5.2.3	Belanja Modal	2.468.253.454,00	
2.05.2.05.01.21.16	Pembangunan Pertokoan di Pangkalan Pendaratan Ikan	2.400.000.000,00	
2.05.2.05.01.21.16.5.2.3	Belanja Modal	2.400.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.21.17	Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan	300.000.000,00	
2.05.2.05.01.21.17.5.2.1	Belanja Pegawai	51.750.000,00	
2.05.2.05.01.21.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	248.250.000,00	
2.05.2.05.01.21.22	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan Tangkap	20.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.21.22.5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
2.05.2.05.01.21.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	
2.05.2.05.01.22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	60.000.000,00	
2.05.2.05.01.22.03	Pemberdayaan Penyuluh Perikanan	60.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.22.03.5.2.1	Belanja Pegawai	15.400.000,00	
2.05.2.05.01.22.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.300.000,00	
2.05.2.05.01.22.03.5.2.3	Belanja Modal	2.300.000,00	
2.05.2.05.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	100.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.23.02	Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan hasil perikanan	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.23.02.5.2.1	Belanja Pegawai	6.950.000,00	
2.05.2.05.01.23.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.050.000,00	
2.05.2.05.01.23.06	Pendampingan pada Kelompok Pengolah Hasil Perikanan	50.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.23.06.5.2.1	Belanja Pegawai	12.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.05.2.05.01.23.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.600.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.23.06.5.2.3	Belanja Modal	6.300.000,00	
2.05.2.05.01.25	Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan Statistik Kelautan dan Perikanan	610.000.000,00	
2.05.2.05.01.25.01	<i>Pengembangan informasi statistik dan perencanaan Kelautan dan Perikanan</i>	100.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.25.01.5.2.1	Belanja Pegawai	37.700.000,00	
2.05.2.05.01.25.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.900.000,00	
2.05.2.05.01.25.01.5.2.3	Belanja Modal	32.900.000,00	
2.05.2.05.01.25.02	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelautan dan Perikanan</i>	100.000.000,00	
2.05.2.05.01.25.02.5.2.1	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
2.05.2.05.01.25.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	
2.05.2.05.01.25.02.5.2.3	Belanja Modal	16.200.000,00	
2.05.2.05.01.25.09	<i>Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan</i>	60.000.000,00	
2.05.2.05.01.25.09.5.2.1	Belanja Pegawai	4.850.000,00	
2.05.2.05.01.25.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.150.000,00	
2.05.2.05.01.25.10	<i>Penyusunan Amdal</i>	350.000.000,00	
2.05.2.05.01.25.10.5.2.1	Belanja Pegawai	7.750.000,00	
2.05.2.05.01.25.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	335.850.000,00	
2.05.2.05.01.25.10.5.2.3	Belanja Modal	6.400.000,00	
2.05.2.05.01.27	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan	750.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.27.01	<i>Pelatihan dan Peningkatan SDM Karyawan TPI</i>	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.27.01.5.2.1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	
2.05.2.05.01.27.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.250.000,00	
2.05.2.05.01.27.03	<i>Pelatihan dan Peningkatan SDM Budidaya Perikanan</i>	100.000.000,00	
2.05.2.05.01.27.03.5.2.1	Belanja Pegawai	17.400.000,00	
2.05.2.05.01.27.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.600.000,00	
2.05.2.05.01.27.04	<i>Pelatihan dan Peningkatan SDM Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</i>	400.000.000,00	
2.05.2.05.01.27.04.5.2.1	Belanja Pegawai	85.300.000,00	
2.05.2.05.01.27.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	308.000.000,00	
2.05.2.05.01.27.04.5.2.3	Belanja Modal	6.700.000,00	
2.05.2.05.01.27.08	<i>Bimbingan Teknis SDM Pengawas Sumberdaya Perikanan</i>	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.27.08.5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
2.05.2.05.01.27.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	
2.05.2.05.01.27.09	<i>Pendidikan Lingkungan Pesisir Bagi Generasi Muda</i>	150.000.000,00	
2.05.2.05.01.27.09.5.2.1	Belanja Pegawai	45.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.05.2.05.01.27.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.700.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.28	Program Pengelolaan Sumberdaya Kawasan Pesisir dan Perikanan	210.000.000,00	
2.05.2.05.01.28.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan Perlindungan, Pelestarian dan /atau Pemanfaatan</i>	50.000.000,00	
2.05.2.05.01.28.01.5.2.1	Belanja Pegawai	9.825.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.28.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.175.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.28.02	<i>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha</i>	100.000.000,00	
2.05.2.05.01.28.02.5.2.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.28.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.800.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.28.03	<i>Pengembangan Desa Pesisir Tangguh</i>	60.000.000,00	
2.05.2.05.01.28.03.5.2.1	Belanja Pegawai	30.950.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.28.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.050.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.29	Program Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Perikanan	250.000.000,00	
2.05.2.05.01.29.01	<i>Pengawasan Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya</i>	25.000.000,00	
2.05.2.05.01.29.01.5.2.1	Belanja Pegawai	14.300.000,00	
2.05.2.05.01.29.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
2.05.2.05.01.29.02	<i>Pengawasan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Pengolahan Hasil Perikanan</i>	25.000.000,00	
2.05.2.05.01.29.02.5.2.1	Belanja Pegawai	14.300.000,00	
2.05.2.05.01.29.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
2.05.2.05.01.29.05	<i>Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Sumberdaya Pesisir dan Perikanan</i>	100.000.000,00	
2.05.2.05.01.29.05.5.2.1	Belanja Pegawai	31.400.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.29.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.600.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.29.06	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Pesisir dan Perikanan</i>	100.000.000,00	
2.05.2.05.01.29.06.5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.05.2.05.01.30	Program Pelestarian Sumberdaya Pesisir dan Perikanan	250.000.000,00	
2.05.2.05.01.30.01	<i>Rehabilitasi Kawasan Konservasi Mangrove</i>	75.000.000,00	
2.05.2.05.01.30.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.05.2.05.01.30.02	<i>Rehabilitasi Kawasan Sempadan Pantai</i>	175.000.000,00	
2.05.2.05.01.30.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
2.05.2.05.01.31	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	500.000.000,00	
2.05.2.05.01.31.01	<i>Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tambakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tambakau (Pelatihan dan Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan)</i>	100.000.000,00	
2.05.2.05.01.31.01.5.2.1	Belanja Pegawai	41.050.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05.2.05.01.31.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.950.000,00	Peraturan Bupati Rembang

KODE REKENING 1	URAIAN 2	JUMLAH 3	DASAR HUKUM 4
2.05 . 2.05.01 . 31 . 02	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembaku dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembaku (Pelatihan dan Pengembangan Usaha Perbengkelan Mesin Kapal Nelayan)	150.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.350.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05 . 2.05.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.650.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05 . 2.05.01 . 31 . 03	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembaku dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembaku (Pelatihan dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya)	150.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.475.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05 . 2.05.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.075.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05 . 2.05.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 31 . 04	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembaku dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembaku (Pelatihan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Kawasan Pesisir)	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.100.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05 . 2.05.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.900.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05 . 2.05.01 . 31 . 05	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembaku dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembaku (Pelatihan dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat)	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.225.000,00	Peraturan Bupati Rembang
2.05 . 2.05.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.775.000,00	Peraturan Bupati Rembang
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.957.050.315,00)	

Pj. BUPATI REMBANG

SUKO MARDIONO

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BAG. J. DINAS / INSTANSI / KANTOR	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Usuran Pemerintahan : 2.05 Usuran Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 2.05.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
		3	4	5	
2	Usuran Pilihan				
2.05	Kelautan dan Perikanan				
2.05.2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.401.205.000,00	5.976.749.000,00	18.553.162.815,00	27.931.116.815,00
2.05.2.05.01.01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	416.610.000,00	381.994.000,00	5.000.000,00	803.504.000,00
2.05.2.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.05.2.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
2.05.2.05.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	343.800.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00	350.000.000,00
2.05.2.05.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	54.750.000,00	250.000,00	0,00	55.000.000,00
2.05.2.05.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.05.2.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.05.2.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2.05.2.05.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.05.2.05.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.05.2.05.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.05.2.05.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2.05.2.05.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.05.2.05.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
2.05.2.05.01.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	18.060.000,00	444.000,00	0,00	18.504.000,00
2.05.2.05.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2.05.2.05.01.02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	10.000.000,00	90.000.000,00	180.000.000,00	280.000.000,00
2.05.2.05.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.05.2.05.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.05.2.05.01.02.12	Pengadaan lap top	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.05.2.05.01.02.17	Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.05.2.05.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2.05.2.05.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2.05 . 2.05.01 . 02 . 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03 . 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.900.000,00	137.600.000,00	25.500.000,00	200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05 . 04	Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM	36.900.000,00	137.600.000,00	25.500.000,00	200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	57.350.000,00	32.150.000,00	15.500.000,00	105.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06	Penyelenggaraan forum SKPD	9.650.000,00	9.850.000,00	5.500.000,00	25.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 07	Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan	13.900.000,00	11.100.000,00	0,00	25.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 10	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	10.500.000,00	4.500.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06 . 11	Penyusunan Dokumen-Dokumen Anggaran	23.300.000,00	6.700.000,00	0,00	30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Penguasaan Sumberdaya Laut	44.600.000,00	130.400.000,00	0,00	175.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01	Penyuluhan Hukum Dalam Penguasaan Sumberdaya Laut	16.200.000,00	33.800.000,00	0,00	50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02	Sosialisasi dan penerapan sistem perijinan Kelautan dan Perikanan	16.100.000,00	33.900.000,00	0,00	50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17 . 03	Pemanganan konflik nelayan dan penertiban alat tangkap	12.300.000,00	62.700.000,00	0,00	75.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	48.210.000,00	201.790.000,00	0,00	250.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02	Promosi Kelautan dan Perikanan	22.550.000,00	127.450.000,00	0,00	150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19 . 03	Sosialisasi Gemar Makan Ikan	25.660.000,00	74.340.000,00	0,00	100.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	55.600.000,00	449.400.000,00	125.000.000,00	630.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	2.000.000,00	48.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 02	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	10.000.000,00	40.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	16.000.000,00	184.000.000,00	0,00	200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 04	Peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan	0,00	5.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20 . 06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Balai Benih Ikan	27.600.000,00	172.400.000,00	0,00	200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.212.260.000,00	2.444.440.000,00	18.022.912.815,00	22.679.612.815,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 01	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	19.200.000,00	30.800.000,00	0,00	50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 02	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	0,00	0,00	7.741.359.361,00	7.741.359.361,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan	30.000.000,00	270.000.000,00	0,00	300.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 06	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	0,00	0,00	5.150.000.000,00	5.150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	2.107.560.000,00	1.129.140.000,00	63.300.000,00	3.300.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	0,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 14	Pembangunan Jalan Pangkalan Pendaratan Ikan	0,00	0,00	2.468.253.454,00	2.468.253.454,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 16	Pembangunan Pertokoan di Pangkalan Pendaratan Ikan	0,00	0,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 21 . 17	Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan	51.750.000,00	248.250.000,00	0,00	300.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 113

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
		3	4	5	
1	2				
2.05.2.05.01.21.22	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan Tangkap	3.750.000,00	16.250.000,00	0,00	20.000.000,00
2.05.2.05.01.22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	15.400.000,00	42.300.000,00	2.300.000,00	60.000.000,00
2.05.2.05.01.22.03	Pemberdayaan Penyuluh Perikanan	15.400.000,00	42.300.000,00	2.300.000,00	60.000.000,00
2.05.2.05.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	19.050.000,00	74.850.000,00	6.300.000,00	100.000.000,00
2.05.2.05.01.23.02	Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan hasil perikanan	6.950.000,00	43.050.000,00	0,00	50.000.000,00
2.05.2.05.01.23.06	Pendampingan pada Kelompok Pengolah Hasil Perikanan	12.100.000,00	31.600.000,00	6.300.000,00	50.000.000,00
2.05.2.05.01.25	Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan Statistik Kelautan dan Perikanan	112.800.000,00	441.700.000,00	55.500.000,00	610.000.000,00
2.05.2.05.01.25.01	Pengembangan Informasi statistik dan perencanaan Kelautan dan Perikanan	37.200.000,00	29.900.000,00	32.900.000,00	100.000.000,00
2.05.2.05.01.25.02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelautan dan Perikanan	63.000.000,00	20.800.000,00	16.200.000,00	100.000.000,00
2.05.2.05.01.25.09	Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan	4.850.000,00	55.150.000,00	0,00	60.000.000,00
2.05.2.05.01.25.10	Penyusunan Amdal	7.750.000,00	335.050.000,00	6.400.000,00	350.000.000,00
2.05.2.05.01.27	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan	164.250.000,00	579.050.000,00	6.700.000,00	750.000.000,00
2.05.2.05.01.27.01	Pelatihan dan Peningkatan SDM Karyawan TPI	8.750.000,00	41.250.000,00	0,00	50.000.000,00
2.05.2.05.01.27.03	Pelatihan dan Peningkatan SDM Budidaya Perikanan	17.400.000,00	82.600.000,00	0,00	100.000.000,00
2.05.2.05.01.27.04	Pelatihan dan Peningkatan SDM Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	85.300.000,00	308.000.000,00	6.700.000,00	400.000.000,00
2.05.2.05.01.27.06	Bimbingan Teknik SDH Pengawas Sumberdaya Perikanan	7.500.000,00	42.500.000,00	0,00	50.000.000,00
2.05.2.05.01.27.09	Pendidikan Lingkungan Pesisir Bagi Generasi Muda	45.300.000,00	104.700.000,00	0,00	150.000.000,00
2.05.2.05.01.28	Program Pengelolaan Sumberdaya Kawasan Pesisir dan Perikanan	50.975.000,00	159.025.000,00	0,00	210.000.000,00
2.05.2.05.01.28.01	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan Perlindungan, Pelestarian dan /atau Pemanfaatan	9.825.000,00	40.175.000,00	0,00	50.000.000,00
2.05.2.05.01.28.02	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	10.200.000,00	89.800.000,00	0,00	100.000.000,00
2.05.2.05.01.28.03	Pengembangan Desa Pesisir Tangguh	30.950.000,00	29.050.000,00	0,00	60.000.000,00
2.05.2.05.01.29	Program Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Perikanan	60.000.000,00	90.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00
2.05.2.05.01.29.01	Pengawasan Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	14.300.000,00	10.700.000,00	0,00	25.000.000,00
2.05.2.05.01.29.02	Pengawasan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Pengolahan Hasil Perikanan	14.300.000,00	10.700.000,00	0,00	25.000.000,00
2.05.2.05.01.29.05	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Sumberdaya Pesisir dan Perikanan	31.400.000,00	68.600.000,00	0,00	100.000.000,00
2.05.2.05.01.29.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Pesisir dan Perikanan	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.05.2.05.01.30	Program Pelestarian Sumberdaya Pesisir dan Perikanan	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
2.05.2.05.01.30.01	Rehabilitasi Kawasan Konservasi Mangrove	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
2.05.2.05.01.30.02	Rehabilitasi Kawasan Sempadan Pantai	0,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00
2.05.2.05.01.31	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	97.200.000,00	394.350.000,00	8.450.000,00	500.000.000,00
2.05.2.05.01.31.01	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tambakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tambakau (Pelatihan dan Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan)	41.050.000,00	58.950.000,00	0,00	100.000.000,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2.05 . 2.05.01 . 31 . 02	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembaku dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembaku (Pelatihan dan Pengembangan Usaha Perbengkelan Mesin Kapal Nelayan)	16.350.000,00	133.650.000,00	0,00	150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 31 . 03	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembaku dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembaku (Pelatihan dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya)	24.475.000,00	117.075.000,00	8.450.000,00	150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 31 . 04	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembaku dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembaku (Pelatihan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Kawasan Pesisir)	7.100.000,00	42.900.000,00	0,00	50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 31 . 05	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembaku dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembaku (Pelatihan dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat)	8.225.000,00	41.775.000,00	0,00	50.000.000,00
	JUMLAH	3.401.205.000,00	5.976.749.000,00	18.553.162.815,00	27.931.116.815,00

Pj. BUPATI REMBANG



SUKO MARDIONO

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BEO. PUSKAMA	
DAFTAR DIRASAT INSTANSI/KANTOR	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
01	PELAYANAN UMUM	92.890.238.000,00	342.259.722.000,00	39.068.297.000,00	58.095.723.700,00	17.469.791.300,00	549.783.772.000,00
	01 1	3.538.165.000,00	0,00	3.046.082.000,00	4.400.350.000,00	144.000.000,00	11.128.597.000,00
	01 1 20	78.554.899.000,00	342.259.722.000,00	34.796.882.000,00	50.917.956.500,00	14.561.033.500,00	521.090.493.000,00
	01 1 21	8.776.994.000,00	0,00	892.773.000,00	1.843.397.200,00	2.368.057.800,00	13.881.222.000,00
	01 1 24	2.020.160.000,00	0,00	332.560.000,00	934.020.000,00	396.700.000,00	3.683.460.000,00
03	KETERLIBATAN DAN KEAMANAN	7.268.804.000,00	0,00	4.321.365.000,00	7.232.134.000,00	5.560.687.000,00	24.382.990.000,00
03 1	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	7.268.804.000,00	0,00	4.321.365.000,00	7.232.134.000,00	5.560.687.000,00	24.382.990.000,00
04	EKONOMI	34.313.647.000,00	0,00	12.440.476.000,00	78.129.305.249,00	43.580.566.787,00	168.463.295.036,00
04 1	Perhubungan	5.867.437.000,00	0,00	1.467.200.000,00	2.431.875.000,00	776.791.000,00	10.543.303.000,00
04 1 14	Tenaga Kerja	5.586.256.000,00	0,00	1.195.628.000,00	2.964.321.500,00	1.026.678.500,00	10.772.884.000,00
04 1 15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9.490.304.000,00	0,00	1.382.379.000,00	1.715.626.000,00	351.419.000,00	12.939.728.000,00
04 1 16	Pencetakan Modal	0,00	0,00	373.065.000,00	448.725.000,00	7.630.000,00	829.420.000,00
04 1 22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	849.623.000,00	1.666.277.000,00	74.100.000,00	2.590.000.000,00
04 2 01	Pertanian	6.596.795.000,00	0,00	2.495.074.000,00	45.746.461.000,00	3.412.202.361,00	58.250.532.361,00
04 2 02	Kehutanan	0,00	0,00	189.950.000,00	3.822.030.000,00	333.218.111,00	4.345.198.111,00
04 2 03	Energi dan Sumberdaya Mineral	2.468.148.000,00	0,00	482.688.000,00	11.493.027.000,00	2.717.300.000,00	17.161.163.000,00
04 2 05	Kelautan dan Perikanan	4.304.707.000,00	0,00	3.401.205.000,00	5.976.749.000,00	18.553.162.815,00	32.235.823.815,00
04 2 06	Perdagangan	0,00	0,00	204.214.000,00	862.483.749,00	16.302.245.000,00	17.368.942.749,00
04 2 07	Perindustrian	0,00	0,00	341.400.000,00	907.780.000,00	25.820.000,00	1.275.000.000,00
04 2 08	Transmigrasi	0,00	0,00	58.050.000,00	93.950.000,00	0,00	152.000.000,00
05	LINGKUNGAN HIDUP	2.707.932.000,00	0,00	563.990.000,00	997.247.000,00	1.882.253.000,00	6.151.422.000,00
05 1	Lingkungan Hidup	2.707.932.000,00	0,00	563.990.000,00	997.247.000,00	1.882.253.000,00	6.151.422.000,00
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	14.979.035.000,00	0,00	4.965.349.000,00	25.631.720.500,00	176.705.837.548,00	222.281.942.048,00
06 1	Pekerjaan Umum	14.979.035.000,00	0,00	4.965.349.000,00	25.631.720.500,00	176.705.837.548,00	222.281.942.048,00
07	KESEHATAN	75.634.586.000,00	0,00	64.425.943.800,00	67.329.217.896,00	75.126.146.830,00	282.515.894.526,00

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
07 1 02	Kesehatan	66.058.369.000,00	0,00	63.158.582.800,00	65.096.252.586,00	73.364.656.830,00	267.677.861.216,00
07 1 12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	9.576.217.000,00	0,00	1.267.361.000,00	2.232.965.310,00	1.761.490.000,00	14.838.033.310,00
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	2.766.281.000,00	0,00	941.666.000,00	3.750.889.000,00	4.408.035.000,00	11.866.871.000,00
08 1 17	Kebudayaan	0,00	0,00	194.895.000,00	494.055.000,00	168.050.000,00	857.000.000,00
08 2 04	Pariwisata	2.766.281.000,00	0,00	746.771.000,00	3.256.834.000,00	4.239.985.000,00	11.009.871.000,00
10	PENDIDIKAN	575.387.143.000,00	0,00	9.145.697.000,00	14.452.336.600,00	62.314.925.100,00	661.300.101.700,00
10 1 01	Pendidikan	575.387.143.000,00	0,00	8.423.297.000,00	12.398.036.600,00	61.641.625.100,00	657.850.101.700,00
10 1 18	Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00	699.250.000,00	1.727.450.000,00	473.300.000,00	2.900.000.000,00
10 1 26	Perpustakaan	0,00	0,00	23.150.000,00	326.850.000,00	200.000.000,00	550.000.000,00
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	3.006.935.000,00	0,00	2.467.730.000,00	4.161.482.800,00	833.429.000,00	10.469.576.800,00
11 1 10	Kependudukan dan Catatan Sipil	3.006.935.000,00	0,00	1.200.330.000,00	1.462.335.800,00	374.976.000,00	6.044.576.800,00
11 1 11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	627.595.000,00	1.520.655.000,00	16.750.000,00	2.165.000.000,00
11 1 13	Sosial	0,00	0,00	639.805.000,00	1.178.492.000,00	441.703.000,00	2.260.000.000,00
		808.954.601.000,00	342.259.722.000,00	138.340.513.800,00	259.780.056.745,00	387.881.671.565,00	1.937.216.565.110,00

Pj. BUPATI REMBANG



SUKO MARJIONO

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUMAS	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

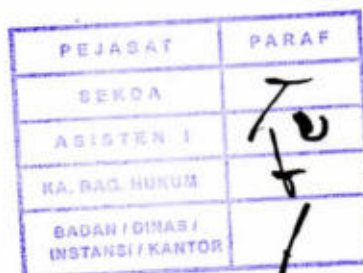
KABUPATEN REMBANG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2016

(Orang)

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	18	1	-	-	6	-	25
Golongan IV/b	-	4	54	-	-	131	2	191
Golongan IV/a	-	-	71	56	-	2.641	3	2.771
JUMLAH GOLONGAN IV	-	22	126	56	-	2.778	5	2.987
Golongan III/d	-	-	-	213	8	405	40	666
Golongan III/c	-	-	-	144	7	422	112	685
Golongan III/b	-	-	-	9	23	444	642	1.118
Golongan III/a	-	-	-	-	1	473	274	748
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	0	366	39	1.744	1.068	3.217
Golongan II/d	-	-	-	-	2	276	138	416
Golongan II/c	-	-	-	-	-	195	357	552
Golongan II/b	-	-	-	-	-	3	476	479
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	304	304
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	2	474	1.275	1.751
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	57	57
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	138	138
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	33	33
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	6	6
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	234	234
TOTAL	-	22	126	422	41	4.996	2.582	8.189

Pj. BUPATI REMBANG

SUKO MARDIONO



KABUPATEN REMBANG
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Uraian Rincian Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan tahun n-2 (2014)	Perkiraan penambahan tahun n-1 (2015)	Perkiraan pengurangan tahun n-1 (2015)	Perkiraan saldo akhir tahun tahun n-1 (2015)
1	2	4	5	6	7 = 4-5-6
	Piutang Pajak				
1	Pajak Hotel	2.425.000,00	-	-	2.425.000,00
2	Pajak Restoran	28.406.650,00	-	-	28.406.650,00
3	Pajak Hiburan	42.360.500,00	-	-	42.360.500,00
4	Pajak Reklame	34.256.200,00	-	-	34.256.200,00
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.879.844.777,00	-	-	2.879.844.777,00
6	Pajak Sarang Rurung Walet	196.657.000,00	-	-	196.657.000,00
7	Pajak Parkir	1.025.000,00	-	-	1.025.000,00
8	Pajak Air Tanah	6.310.550,00	-	-	6.310.550,00
9	Pajak PBB	15.210.274.840,00	-	-	15.210.274.840,00
	Jumlah	18.401.560.517,00	-	-	18.401.560.517,00
	Piutang Retribusi				
9	Retribusi Sewa Kios Pasar	243.729.500,00	-	-	243.729.500,00
10	Retribusi Sewa Kios Terminal	170.085.000,00	-	-	170.085.000,00
11	Rumah Dinas	7.278.000,00	-	-	7.278.000,00
12	Sewa Tanah	5.112.000,00	-	-	5.112.000,00
13	Sewa Tanah dan Bangunan Pasar Sedan	43.134.000,00	-	-	43.134.000,00
	Jumlah:	469.338.500,00	-	-	469.338.500,00

No.	Uraian Rincian Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan tahun n-2 (2014)	Perkiraan penambahan tahun n-1 (2015)	Perkiraan pengurangan tahun n-1 (2015)	Perkiraan saldo akhir tahun tahun n-1 (2015)
1	2	4	5	6	7 = 4+5-6
	Piutang Lainnya				
14	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	10.343.888.751,83	-	-	10.343.888.751,83
15	Piutang DKK	348.551.000,00			348.551.000,00
	Jumlah	10.692.439.751,83	-	-	10.692.439.751,83
	JUMLAH	29.563.338.768,83	0,00	0,00	29.563.338.768,83

Pj. BUPATI REMBANG



SUKO MARDIONO

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUMAS	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

KABUPATEN REMBANG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9-7+8	10-6-9	11	12	13-9-12
	2016	INVESTASI PERMANEN										
1		PD BPR BKK LASEM	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013		11.270.000.000	8.000.000.000	3.270.000.000	11.270.000.000	-	2.400.000.000		11.270.000.000
2		PDBKK KALORI	tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah		710.000.000	355.000.000	-	355.000.000	355.000.000	400.000.000		355.000.000
3		PD BPR BANK PASAR	Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011		5.117.000.000	5.117.000.000	-	5.117.000.000	-	700.000.000		5.117.000.000
4		PDAM	tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan	Tunai	10.000.000.000	6.200.000.000	3.800.000.000	10.000.000.000	-	-		10.000.000.000
5		Unit Apolik Rembang pada PD Aneka	Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD		1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	-		-
6		Unit Percetakan Daerah pada PD	BPR BKK Lasem, PD BKK Kaliori dan PT.		1.000.000.000	800.000.000	-	800.000.000	200.000.000	40.000.000		800.000.000
7		ANEKA PERUSDA	Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah		20.035.000.000	9.200.000.000	5.200.000.000	14.400.000.000	5.635.000.000	2.800.000.000		14.400.000.000
		PT BANK JATENG										
			JUMLAH		49.132.000.000	21.672.000.000	12.270.000.000	41.942.000.000	7.190.000.000	6.340.000.000	-	41.942.000.000

PJ. BUPATI REMBANG,



SUKO MARJONO

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DSS. REMBANG	
BADAN PELAKSANA	
INSTANSI / KANTOR	

KABUPATEN REMBANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

(Dalam rupiah)

No.	Jenis aset lainnya	Saldo pada akhir tahun n-2 (2014)	Perkiraan penambahan tahun n-1 (2015)	Perkiraan pengurangan tahun n-1 (2015)	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1 (2015)
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Tanah	250.814.959.708	-	-	250.814.959.708
2	Peralatan Mesin	246.044.197.413	-	-	246.044.197.413
	Alat Berat	18.382.020.135			18.382.020.135
	Alat Angkutan	65.087.926.518			65.087.926.518
	Alat Bengkel dan ukur	4.115.424.203			4.115.424.203
	Alat Pertanian	3.268.278.650			3.268.278.650
	Alat kantor dan Rumah Tangga	105.854.033.795			105.854.033.795
	Alat Studio dan Komunikasi	10.371.534.950			10.371.534.950
	Alat Kedokteran	26.188.409.646			26.188.409.646
	Alat Laboratorium	11.679.910.180			11.679.910.180
	Alat Keamanan	1.096.659.336			1.096.659.336
3	Gedung dan Bangunan	443.376.966.820	-	-	443.376.966.820
	Bangunan Gedung	436.908.669.935			436.908.669.935
	Bangunan Monumen	6.468.296.885			6.468.296.885
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	689.145.162.555	-	-	689.145.162.555
	Jalan dan Jembatan	489.438.259.879			489.438.259.879
	Bangunan Air (Irigasi)	139.299.929.999			139.299.929.999
	Instalasi	18.986.588.167			18.986.588.167
	Jaringan	41.420.384.510			41.420.384.510
5	Aset Tetap Lainnya	53.492.726.843			53.492.726.843
	Buku dan Perpustakaan	31.392.565.145			31.392.565.145
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	21.490.544.698			21.490.544.698

**KABUPATEN REMBANG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2016**

PJ.BUPATI REMBANG,

SUKO MARDIONO

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
K.A. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN XIII :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR : 3 TAHUN 2015
 TENTANG :
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

KABUPATEN REMBANG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

No	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rupiah)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Anggaran Tahun 2016		Jumlah Sisa Pembayaran	
						Pokok Utang (Rupiah)	Bunga (Rupiah)	Cicilan Pokok (Rupiah)	Bunga (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LOAN-ADB 1198-INO	SK Bupati Rembang Nomor 900/3112 Tgl. 02 Agustus 1995 SK Persetujuan DPRD Nomor 650/316/1995 Tgl 26 September 1995	803.043.000	15 Tahun (30 kali) masa tenggang 5 Tahun	Jalan Kota, Drainase, Persampahan	53.450.842	22.382.912	80.176.266	22.243.343
						53.450.842	22.382.912	80.176.266	22.243.343

Pj. BUPATI REMBANG



SUKO MARDIONO

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BAGAS / DINAS / INSTANSI / KANTOR	